

MASYARAKAT

Jurnal Sosiologi

Artikel

ISSN : 0852-8489

e- ISSN : 2460-8165



Akumulasi Melalui Perampasan dan Kemiskinan di Flores

Penulis: Emilianus Yakob Sese Tolo

Dipublikasikan oleh: *LabSosio*, Pusat Kajian Sosiologi FISIP-UI

Diterima: Februari 2016; Disetujui: September 2016

MASYARAKAT, Jurnal Sosiologi, diterbitkan oleh *LabSosio*, Pusat Kajian Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Jurnal ini menjadi media informasi dan komunikasi dalam rangka pengembangan sosiologi di Indonesia. Redaksi MASYARAKAT mengundang para sosiolog, peminat sosiologi dan para mahasiswa untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif demi pengembangan sosiologi di Indonesia. Untuk kriteria dan panduan penulisan artikel maupun resensi buku, silahkan kunjungi tautan berikut: www.journal.ui.ac.id/mjs

Untuk mengutip artikel ini (ASA Style):

Tolo, Emilianus Yakob Sese. 2016. "Akumulasi Melalui Perampasan dan Kemiskinan di Flores." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 21(2):173-204.

SK Dirjen Dikti Akreditasi Jurnal No. 80/DIKTI/Kep/2012

Akumulasi Melalui Perampasan dan Kemiskinan di Flores

Emilianus Yakob Sese Tolo

Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Email: emilianustolo@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan persoalan kemiskinan di Flores dari perspektif ekonomi politik. Melalui penelitian kualitatif dengan tinjauan kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa kemiskinan di Flores disebabkan oleh akumulasi melalui perampasan yang berkaitan dengan tiga hal pokok, yakni sejarah penjajahan yang panjang, ketimpangan agraria, dan depolitisasi massa rakyat. Penjajahan yang panjang telah menyebabkan perubahan struktur pemerintahan dan agraria demi akumulasi melalui perampasan. Ketimpangan agraria mempermudah proses akumulasi melalui perampasan. Dengan hanya mengandalkan perlawanan spontan yang tak terorganisasi, proses akumulasi melalui perampasan tak terbendung dan terus mengeskalasi hingga saat ini.

Abstract

This article aims to explain the poverty in Flores by using a political economy perspective. Through qualitative research method by literature review, this article argues that poverty in the region is caused by the accumulation by dispossession through three main areas, namely the long colonial history, agrarian inequality, and the depoliticization of the masses. The long history of colonization has led to the change of the system of administration and the agrarian structure for the sake of the accumulation by dispossession. The agrarian inequalities facilitate the process of accumulation by dispossession. Just by relying on unorganized spontaneous resistances, the accumulation by dispossession is unstoppable and keeps escalating until today.

Keywords: accumulation by dispossession, poverty, Flores.

PENDAHULUAN

Pada kurun waktu lima tahun antara 2010 hingga 2014 pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tampak riang dengan profil pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang terus merangkak naik.¹ Namun, jika menengok fakta kemiskinan pada tahun 2014, tren positif ini menjadi tidak bermakna karena dari total 4,8 juta penduduk masih terdapat lebih dari 1 juta penduduk NTT dikategorikan miskin. Performa ekonomi NTT yang positif ini hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik. Sebaliknya, sekitar 1,32 juta petani dan 1,8 juta pekerja informal dari total 2,25 juta angkatan kerja di NTT mengalami dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi tersebut (BPS NTT 2015).

Penelitian mengenai Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur oleh para peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (2014) menegaskan bahwa kemiskinan di NTT disebabkan oleh “[f]aktor alam, seperti kekeringan dan kemarau panjang, keterbatasan sumber daya alam (SDA) dan rendahnya sumber daya manusia (SDM),” “daya dukung prasarana dan sarana publik yang minim,” “[p]enyelewengan terhadap dana bantuan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesehatan,” dan ketiadaan *good governance*. Untuk mengatasi persolan ini, para peneliti LIPI merekomendasikan pemerintah untuk “menjalankan otonomi daerah dan prakarsa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di dalam pengembangan wilayah dan upaya yang dilakukan dalam *capacity building* (peningkatan kapasitas) daerah di dalam pengembangan wilayahnya” (Wuryandari 2014:15). Pemerintah pusat dan daerah juga disarankan untuk mengembangkan “teknologi” dan “pembangunan yang menekankan pengembangan wilayah [...] secara terintegrasi dan menyeluruh” (Zaenudin 2014:368, 374). Seperti pandangan kalangan pluralis (Budiman 1990:31-32; 1996:57-59), para peneliti LIPI meyakini pemerintah merupakan aktor kunci yang selalu berlaku netral dan adil bagi semua elemen

¹Pertumbuhan ekonomi di NTT beberapa tahun terakhir selalu positif, yakni 5,63% (2010-2012), 6,0% (2013) dan 6,25% (2014). Sementara itu, pendapatan perkapita juga terus naik, yaitu 4,5 juta rupiah (2008), 5,7 juta rupiah (2010) dan 6,1 juta rupiah (2011) dan 7,8 juta rupiah (2014).

massa rakyat² sehingga dapat melaksanakan agenda pembangunan secara efektif melalui lembaga birokrasinya (Osborne dan Gaebler 1996).

Kajian dan rekomendasi kebijakan para peneliti LIPI di atas menggunakan pendekatan psikologis-kultural yang dalam penjelasannya terhadap masalah pembangunan disebut juga sebagai teori modernisasi (Budiman 1990; Samuel 2010). Di Indonesia, pendekatan ini—yang kuat dipengaruhi oleh sosiologi Parsonian—berkembang pesat sejak Indonesia terlepas dari kungkungan kolonialisme Belanda hingga saat ini. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkembangan pendekatan ini dalam ilmu sosial Indonesia difasilitasi oleh Amerika Serikat dan Eropa Barat yang percaya pada masyarakat terbuka dan pasar bebas serta memusuhi Komunisme (Samuel 2010; Hadiz & Dhakidae 2006). Teori ini berkeyakinan bahwa dunia material dipengaruhi dan dapat diubah oleh ide. Dengan keyakinan demikian, pendekatan ini “bersifat ahistoris, artinya kurang melihat persoalan dalam konteks kesejarahan” (Budiman 1990:49), dan cenderung menghindari “persoalan ekonomi-politik—yaitu persoalan menyangkut penguasaan alat-alat produksi, serta struktur hukum dan kekuasaan yang menopang berlangsungnya ketimpangan sistem” (Li 2007:11; 2012:21). Karena itu, untuk mengentaskan kemiskinan, pendekatan ini melakukan apa yang Li (2007:7; 2012:12) namakan sebagai “teknikalisasi permasalahan” terhadap persoalan kemiskinan melalui program *capacity building*, perbaikan kelembagaan, dan intervensi teknologi-pengetahuan (Wuryandari 2014; Samuel 2010).

Beberapa kritik terhadap teori modernisasi dalam pembangunan pernah ditulis oleh Ferguson (1990), Escobar (1995), dan Li (2007). Ketiga kritik ini umumnya menggunakan pendekatan etnografis-antropologis. Berbeda dengan Ferguson (1990), Escobar (1995), dan Li (2007), dengan melakukan penelitian di Flores penulis menggunakan pendekatan ekonomi politik. Tulisan ini berargumen bahwa kemiskinan di Flores disebabkan oleh *accumulation by dispossession* (akumulasi melalui perampasan) seperti yang diutarakan oleh

²Penggunaan terminologi massa rakyat oleh penulis dalam tulisan ini diinspirasi oleh Lane (2013:188) yang menulis: “... kata rakyat secara esensial adalah terminologi kelas, kata tersebut mengacu terutama pada orang yang miskin dan dihisap; kata tersebut adalah istilah yang dibandingkan dengan kata pembesar, orang kaya, pengusaha dan pejabat.”

Harvey (2003). Jika dibandingkan dengan konsep ekonomi politik Marxist dan post-Marxist yang lain (Therborn 2008), menurut penulis, konsep akumulasi melalui perampasan Harvey (2003) lebih logis untuk menggambarkan proses akumulasi yang sudah dan sedang terjadi di Flores dewasa ini. Akumulasi melalui perampasan di Flores itu terjadi melalui sejarah penjajahan yang panjang, pembiaran terhadap struktur agraria yang timpang, dan depolitisasi massa rakyat yang berkanjang lama hingga hari ini. Akibatnya, ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik ini pun terlembaga dalam institusi birokrasi, politik, dan Gereja Katolik di Flores hingga hari ini.

METODE PENELITIAN

Analisis mengenai persoalan kemiskinan sebagai akibat dari akumulasi melalui perampasan ini merupakan hasil dari studi kepustakaan terhadap jurnal, buku, disertasi, dan koran. Studi ini menggunakan analisis ekonomi politik untuk melacak akar kemiskinan di Flores. Analisis ekonomi politik ini bertujuan untuk “memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan [...] dengan melihat bagaimana golongan kelas yang lebih berkuasa mengakumulasi surplus ekonomi dari golongan kelas bawah untuk kepentingan diri sendiri” dalam konteks sejarah spesifik kehidupan sosial dan ekonomi di Flores (Corta 2010:18).

Dengan menggunakan analisis ekonomi politik, tulisan ini akan menjelaskan proses akumulasi melalui perampasan dalam konteks sejarah kolonisasi yang panjang, ketimpangan agraria, dan depolitisasi massa rakyat di Flores. Tulisan ini juga akan memeriksa formasi ekonomi sebagai dasar pembentukan diferensiasi kelas sosial yang terjadi karena akumulasi melalui perampasan. Sejarah penjajahan memberi dasar pembentukan diferensiasi kelas sosial, terutama di sektor agraria. Depolitisasi massa rakyat membuat persoalan diferensiasi kelas tidak bisa diatasi dan, karena itu, kemiskinan dan ketimpangan terus mengakar di Flores hingga hari ini.

AKUMULASI MELALUI PERAMPASAN

Frase “akumulasi melalui perampasan” digunakan pertama kali oleh Harvey (2003) untuk menggambarkan proses akumulasi kapital yang terjadi dewasa ini. Proses akumulasi ini seringkali disokong oleh

lembaga internasional—International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), dan World Bank (Bank Dunia)—, dan negara adikuasa, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Sejatinya, pengertian akumulasi melalui perampasan tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan pengertian akumulasi primitifnya Karl Marx (2004 [1867]) seperti yang dijelaskan Harvey (2003:144,154):

Tampaknya aneh untuk menyebut proses yang berkelanjutan ini sebagai “primitif” atau “asli”. Saya akan [...] menggantikan istilah ini dengan konsep “akumulasi melalui perampasan”. [...]. Akumulasi melalui perampasan di sini dapat diartikan sebagai biaya yang diperlukan untuk membuat terobosan yang sukses dalam pembangunan kapitalisme dengan dukungan kuat dari kekuasaan negara.

Harvey (2003) mengakui bahwa akumulasi melalui perampasan saat ini dilakukan melalui modus operandi yang lebih intensif, halus, dan bervariasi. Dengan munculnya sistem kredit dan kapitalisasi sektor keuangan yang dimulai sejak awal abad ke-20, akumulasi melalui perampasan terjadi semakin massif dan canggih. Sejak tahun 1973, pasar keuangan menjadi semakin spekulatif dan predatoris. Selain itu, hadirnya aturan hak paten, melalui *TRIPS agreement* dalam negosiasi WTO, dan wacana tentang proteksi terhadap lingkungan hidup juga telah melahirkan akumulasi melalui perampasan dalam sistem kapitalisme yang kanibalistik dan predatoris. Akumulasi melalui perampasan ini juga terjadi melalui privatisasi dan imperialisme yang dilakukan dan disokong oleh negara, lembaga internasional, dan negara adikuasa seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa (Harvey 2003).

Dalam proses mewujudkan agenda privatisasi, konsep “Keynesian baru” diadopsi sebagai upaya untuk mendorong dan memfasilitasi akumulasi kapital. Negara hanya dijadikan aktor yang setara dengan pasar dan *civil society* untuk memungkinkan terjadinya akumulasi melalui perampasan demi kepentingan kelas yang berkuasa dan bermodal (Angelis 2005; Fine 2015). Di Inggris, misalnya, terjadi *privatization of utilities*, seperti air, telekomunikasi, listrik, energi, transportasi, dan pendidikan yang didorong secara terang benderang oleh negara (Harvey 2003:158-159). Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Pada era Orde Baru, sistem agraria Indonesia sangat pro terhadap investasi domestik dan asing setelah disahkannya

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Siahaan 2007). Keberadaan dua UU ini menyebabkan tanah, hutan, dan laut dengan mudah “dikapling” sebagai wilayah konsesi legal untuk mewujudkan akumulasi melalui perampasan (Tolo 2014). Selain itu, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yang sebelumnya dikelola oleh Departemen Agraria diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang lebih mengurus hal-hal administratif (Setiawan 2008). Pada tahun 1971 pemerintah Orde Baru memberhentikan dana program reformasi agraria yang bukan lagi menjadi prioritas pemerintah (Lucas 1992). Ideologi neoliberalisme dalam sektor agraria menjadi pilihan Orde Baru, bahkan hingga era Reformasi saat ini dengan mengikuti skenario pinjaman luar negeri menurut usulan IMF dan Bank Dunia (Awang 2005). Fakta dan fenomena ini sangat tepat diutarakan oleh Harvey (2003) sebagai berikut:

Agar akumulasi melalui perampasan dapat terjadi, tidak hanya finansialisasi dan perdagangan bebas yang diperlukan, tapi juga dengan pendekatan lain yang sangat berbeda, yakni menjadikan negara sebagai pemain utama dalam akumulasi melalui perampasan. [...]. Aset-aset yang dimiliki oleh negara atau yang masih dalam bentuk *commons* dilepaskan ke pasar supaya modal akumulasi-berlebih dapat berinvestasi di dalamnya, meng-*upgrade*-nya, dan berspekulasi di dalamnya. [...]. Aset-aset produktif itu meliputi sumber daya alam. Bumi, hutan, air, udara. Ini semua adalah aset yang dipercayakan oleh massa rakyat kepada negara yang mewakilinya. Merampas aset-aset ini dan menjualnya sebagai saham ke perusahaan swasta adalah proses perampasan barbar yang tidak pernah ada paralelnya dalam sejarah. (Hlm. 156, 158, 161)

Fasilitasi proses akumulasi melalui perampasan ini biasanya didahului oleh gelombang devaluasi yang disebabkan oleh krisis yang sudah diorganisasi secara terukur oleh negara adikuasa, seperti Amerika Serikat, dan lembaga internasional, seperti IMF dan Bank Dunia. Aset-aset yang mengalami devaluasi pada masa krisis lebih mudah untuk diprivatisasi dan dirampas dengan murah oleh pihak

atau negara asing yang memiliki kapital besar atau yang mengalami *overaccumulated capital* (Harvey 2003:149). Selain privatisasi, akumulasi melalui perampasan juga dilakukan melalui imperialisme yang bersifat koersif. Misalnya, intervensi militer Amerika ke Timur Tengah adalah untuk tujuan akumulasi melalui perampasan terhadap sumber daya minyak. Imperialisme juga memiliki tujuan untuk membuka pasar, merombak kelembagaan struktur pemerintah dan ekonomi suatu negara agar sesuai dengan logika kapitalisme global (Harvey 2003). Namun, dewasa ini, di negara-negara berkembang muncul perlawanan sosial dan politik, terutama dari golongan kelas yang dirugikan oleh proses akumulasi melalui perampasan. Pemberontakan Zapatista di Chiapas, Meksiko, adalah salah satu contoh perlawanan untuk *reclaiming the commons* yang telah diprivatisasi untuk kepentingan akumulasi melalui perampasan (Harvey 2003:161). Tetapi perlawanan yang dipelopori oleh perjuangan kelas biasanya dipadamkan dengan kekerasan oleh aparatus negara. Intervensi aparatus negara ini selalu memberi keuntungan bagi perkembangan kapitalisme global (Lane 2013; Harvey 2003). Misalnya, di Asia Timur dan Asia Tenggara (kecuali Korea Selatan), seperti Indonesia (Lane 2013; Lucas 1992), juga di Amerika Latin seperti di Chili pada masa Allende (Budiman 1987), gerakan perlawanan massa rakyat terhadap akumulasi melalui perampasan lazimnya dipatahkan dengan kekerasan oleh aparatus negara.

SEJARAH PENJAJAHAN FLORES

Akumulasi melalui perampasan sudah terjadi sejak lama di Flores melalui imperialisasi. Penduduk Flores sejak abad ke-14 sudah berada di bawah kekuasaan Majapahit (Metzener 1982; Djawang et al. 1987: 35). Waktu itu Flores masih bernama Solot.³ Setelah kerajaan Majapahit runtuh, kemudian dua kerajaan kecil, yakni Goa dan

³Menurut catatan Orinbao (1969), nama pulau Flores yang sebenarnya adalah Nusa Nipa sebab nama ini lebih mewakili keadaan flora dan fauna di pulau Flores. Menurut catatan sejarah, nama pulau Flores berganti-ganti. Sejak tahun 1287, pulau Flores bernama Solot. Namun, ketika Portugis datang, mereka tidak menemui nama pribumi pulau Flores, karena itu, mereka menamai pulau ini Cabo de Flores, yang berarti Tanjung Bunga. Pada tahun 1636, nama Flores di pakai secara resmi oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hendrik Brouwer. Nama inilah yang kemudian digunakan hingga saat ini.

Ternate, menjajah Flores. Pada abad ke-15 dan ke-16, Goa menguasai Flores di bagian Barat dan Tengah, dan Flores bagian Timur diduduki oleh kerajaan Ternate (Orinbao 1969). Tetapi, kekuasaan kedua kerajaan kecil ini tidak berlangsung lama karena kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16, yakni Portugis dan Belanda. Flores bagian Barat, yakni Manggarai, dengan bantuan Belanda akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan kesultanan Bima pada abad ke-18 (Gordon 1975). Namun, menurut laporan lain, Manggarai sudah jatuh ke tangan Bima sejak tahun 1667 akibat perjanjian Bongaya⁴ (Erb 2010).

Dari semua penjajah, Belanda paling berpengaruh secara sosial, ekonomi, dan politik di Flores. Secara formal, Flores baru benar-benar jatuh ke tangan Belanda di tahun 1859 berkat perjanjian Lisbon (*Treaty of Lisbon*) (Webb 1968). Namun, hingga awal abad ke-19, Belanda tidak memerintah Flores secara langsung. Menurut Bekkum (1946 [1974]), hingga awal abad ke-20, Belanda hanya memerintah Flores dari Bima. Tetapi, Belanda baru resmi menjajah Flores pada tahun 1917-1918 setelah para pemimpin lokal yang melakukan pemberontakan sejak tahun 1902 takluk kepada Belanda. Sebelum tahun-tahun tersebut Belanda menjalankan politik *onthoudingspolitiek*, yaitu politik pembiaran terhadap pribumi di wilayah-wilayah pedalaman, seperti Flores, yang dipimpin oleh para pemimpin aristokrat tradisional (Dhakidae 2013:116-121).

Setelah Flores ditaklukkan oleh Belanda, misionaris Katolik ke Flores pada tahun 1917 dan “menstabilkan” birokrasi Gereja Katolik di Flores (Metzner 1982; Dhakidae 2013:119). Tetapi, para pegawai pemerintahan Belanda sudah datang lebih dulu pada tahun 1908 untuk membangun kantor pemerintahannya di Ruteng (Metzner 1982). Bersama Gereja Katolik, Belanda mulai melakukan penjajahan yang lebih sistematis dan terorganisasi di Flores. Gereja Katolik mulai mengembangkan ajaran iman Katolik, membangun infrastruktur publik, dan membuka berbagai institusi pendidikan di bawah payung Politik Etis yang dikeluarkan oleh Belanda pada awal abad ke-20 (Metzner 1982; Nama 2012; Satu 2012).

⁴Perjanjian Bongaya (Bongaaisch Tractaat) adalah perjanjian antara Belanda dan Makasar yang mana pihak Makasar yang berhasil ditaklukkan Belanda harus membayar 1.000 hamba kepada Belanda. Pada saat itu harga untuk seorang hamba adalah senilai 75 guilders (Gordon 1975).

Kedekatan antara Gereja Katolik dan Belanda ketika itu bukan hal yang biasa. Sebelumnya, misi Gereja Katolik di Hindia Belanda memang sengaja dirintangi oleh pemerintah kolonial (Boelaars 2005 [1991]). Belanda tidak suka dengan karya misi Gereja Katolik yang “terlibat dalam pendidikan” (Erb 2010:282). Sikap ini merupakan bagian dari gelagat politik Belanda di Hindia Belanda yang tercermin dalam pernyataan Gubernur Jenderal Baud pada tahun 1836. Pernyataan Baud, seperti ditulis Boelaars (2005 [1991]:90),: “[s] emakin maju propaganda agama Kristen di kawasan-kawasan ini, semakin kuatlah kemandirian rakyat pribumi. ...[D]emi perkara kepentingan Belanda, misi sedapat mungkin dirintangi.” Erb (2010:282) berpendapat bahwa sikap Belanda yang ramah terhadap Gereja Katolik di Flores merupakan implikasi perjanjian dengan Portugis yang “menyerahkan semua klaim atas Flores dan Timor Barat” ke Belanda. Belanda pun tetap mengizinkan pengiriman misionaris Gereja Katolik, tetapi hanya ke Flores saja (Erb 2010). Dari tahun 1913 hingga akhir abad ke-20, kongregasi religius Katolik Societas Verdi Divini (SVD), bersama Belanda, membangun Flores dalam bidang pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan⁵ (Webb 1968; Boelaars 2005).

Ketika Belanda dan Gereja Katolik datang ke Flores pada awal abad ke-20, sistem pemerintahan di Flores pada umumnya masih terorganisasi dalam unit politik kecil (*Nua*)⁶ yang independen beranggotakan 100-200 orang penduduk. Kala itu di Flores terdapat banyak Nua yang secara politik independen satu terhadap yang lain (Metzner 1982; Forth 2001; Tule 2004). Pada awal pemerintahan Belanda di Flores, di Manggarai terdapat 38 *daluh* dan sekitar 150 penjaga tanah (*tua teno*) (Bekum 1946 [1974]).

⁵Walaupun memiliki tujuan tersembunyi agar massa rakyat Flores mampu membayar pajak, Gereja Katolik memang serius mengembangkan pendidikan bermutu sejak masa penjajahan Belanda (Webb 1986). Kebijakan memperkenalkan pendidikan Eropa kala itu memang merupakan kebijakan kolonial seperti yang direkomendasikan oleh Christiaan Snouck Hurgronje. Rekomendasi ini selain bertujuan untuk membuka kesempatan bagi massa rakyat Hindia untuk bekerja dalam perusahaan dan pemerintahan kolonial, tetapi yang paling utama adalah untuk mengatur, menertibkan, dan menguasai massa rakyat di Hindia Belanda (Li 2007; Samuel 2010). Dalam benak kolonialisme Belanda, tujuan pendidikan Eropa yang diperkenalkan oleh Gereja Katolik di Flores memiliki maksud ini.

⁶Unit politik ini merupakan kampung adat yang memiliki tata ekonomi dan pemerintahan yang independen.

Fakta seperti ini menyulitkan agenda penjajahan sehingga mendorong Belanda membentuk sistem kerajaan dengan cara memilih seorang pemimpin lokal yang kuat dan memiliki tanah yang luas (Gordon 1975; Tule 2006). Dari tahun 1909-1929, Belanda membentuk delapan *oderafdeeling* yang dipimpin oleh seorang raja, yakni Manggarai, Ngada, Riung, Nagekeo, Ende, Lio, Sikka, dan Larantuka (Tule 2004; Dhakidae 2013).

Usai menetapkan raja terpilih, Belanda mulai mengubah struktur agraria sesuai dengan kepentingan akumulasi melalui perampasan. Bagaimana tanah harus diolah dan apa yang harus ditanam merupakan bagian dari kebijakan pemerintah kolonial. Sistem pertanian tradisional diganti dengan sistem pertanian modern. Sistem pertanian tradisional *lodok*⁷ di Manggarai, misalnya, diganti dengan *terrace system* oleh Belanda (Gordon 1975). Akibatnya, kedatangan Belanda menandai “dimulainya peningkatan pertanian dan produktivitas pangan” dan massa rakyat mulai mengadaptasikan pertaniannya dengan tanaman komoditi. Semua daerah pertanian yang dibuka oleh Belanda, seperti persawahan, “tidak lagi membutuhkan keputusan komunal tentang waktu penanaman atau tentang sistem pembagian kerjanya” (Gordon 1975:15, 131). Apalagi, raja pilihan Belanda cenderung bertindak sewenang-wenang mengubah sistem agraria setempat untuk memperlancar akumulasi kapital diri sendiri dan pihak penjajah. Pada tahun 1930, Raja Sikka, misalnya, mendeklarasikan dirinya sebagai pemilik semua tanah yang tidak ditempati dan digarap di Sikka lalu menjualnya kepada orang-orang Bugis. Konsekuensinya, pada saat itu, “sistem kepemilikan tanah komunal hampir hilang di Sikka bagian Tengah” (Metzner 1982:225). Intervensi Belanda dalam sektor agraria ini menyebabkan peralihan kepemilikan tanah dari komunal ke kepemilikan individual. Kepemilikan individual ini kemudian menyebabkan “naiknya tingkat kesuburan” dan nilai nominal tanah itu sendiri. Transaksi tanah mulai dilegalkan dan, karena itu, memperparah ketimpangan agraria di Flores hingga hari ini (Metzner 1982:227).

⁷Sistem *lodok* memastikan pembagian tanah yang mana setiap keluarga dalam *mbaru gendang* mendapatkan beberapa keping tanah dari beberapa *lingko* yang berbeda dan digarap setiap tahun berdasarkan sistem budidaya kampung.

KETIMPANGAN AGRARIA

Pada masa imperialisme, struktur kepemilikan tanah yang lama dengan mudah dibelokkan untuk kepentingan penjajah. Metode dan logika kolonialisme ini kemudian diadopsi oleh kalangan aristokrat tradisional sepeninggal para penjajah di Flores. Tanah ulayat mulai jatuh ke tangan golongan aristokrat tradisional. Padahal, sebagai bagian dari bangsa Astronesia, di Flores tidak dikenal konsep tuan tanah (*land lord*), melainkan penjaga tanah (*land guardian*) (Tule 2006; Tule 2013). Meskipun secara keliru menyamakan arti tuan tanah dan penjaga tanah dalam konteks Flores kala itu, Dhakidae (2013:119-121) sama sekali tidak meleset ketika menulis bahwa “Flores [...] yang tidak terkena hukum ‘hak pribadi atas tanah’ pada dasarnya dikuasai oleh para tuan tanah yang tidak lain adalah ‘raja-raja’ lokal.” Dewasa ini, di Flores, kecuali di Manggarai (Tolo 2012; Gordon 1975), banyak kalangan aristokrat tradisional mengaku sebagai tuan tanah, seperti dalam konsep *land lord* yang dipahami oleh penduduk Eropa.⁸

Pada Agustus 2014, penduduk NTT yang bekerja di sektor pertanian sebesar 1,32 juta orang (60,77%) (BPS NTT 2015). Di NTT, khususnya di Flores, mayoritas petani bertanam sempit dan menjadi tuna kisma karena dewasa ini tanah-tanah di Flores mulai terkonsentrasi pada petani kaya (Gordon 1975), birokrat (Gordon 1975; Tolo 2013b), politisi (*Tempo* 6 Maret 2015), pengusaha Tionghoa (Tolo 2013b), pengusaha pariwisata (Dale 2013),

⁸Konsep tuan tanah adalah konsep yang berarti bahwa seorang atau sekelompok orang dikategorikan sebagai pemilik sah mayoritas tanah dalam satu massa rakyat tertentu, dan kelompok lain bekerja sebagai penggarap. Sementara itu, konsep penjaga tanah tidak membenarkan kepemilikan tanah ratusan atau ribuan hektar, sebab penjaga tanah bukan pemilik tanah, tetapi penjamin kepemilikan tanah oleh seluruh anggota suku, pemimpin ritual berkaitan dengan tanah dan pemimpin dalam mengurai konflik-konflik berkaitan dengan tanah (Tule 2013). Penelitian saya di Manggarai (2013b) menunjukkan peran penjaga tanah persis seperti diperankan oleh *tu'a teno* dalam kehidupan sosial Manggarai hingga hari ini seperti juga yang ditulis oleh Gordon (1975: 126) sebagai berikut: “*Tu'a teno* tidak harus memiliki tanah lebih banyak dari massa rakyat kampung yang lain, meskipun hal itu kadang terjadi. Hak atas tanah di Manggarai dimiliki secara merata oleh semua massa rakyat kampung atau desa. Dalam sebuah kampung, *tu'a teno* memiliki otoritas untuk mendistribusikan tanah, tanah yang sudah dibagi menjadi hak milik pribadi pemiliknya dan keturunannya (anak laki-laki tertua dalam kaitannya dengan lingko), bukan milik *tu'a teno*.”

investor tambang (Regus 2011; Hasiman 2013), dan Gereja Katolik⁹ (Tule 2013; Dale 2013; Prior 2013). Karena distribusi tanah yang timpang ini, pada tahun 2013 rata-rata 34 keluarga petani kaya di Flores menguasai 476 hektar tanah. Namun, 78 keluarga petani gurem hanya menguasai 27 hektar. Artinya, petani kaya menguasai 17 kali luas rata-rata petani gurem di Flores (Tolo 2013b). Dengan kepemilikan tanah yang terkonsentrasi pada penguasa dan kaum bermodal, tidak heran jika banyak tuna kisma menjadi penggarap dan buruh tani di Flores. Misalnya, Flori Seda di kecamatan Boawae, kabupaten Nagekeo, Flores, hanya memiliki 0,12 hektar tanah pertanian pribadi. Untuk mempertahankan hidup keluarganya, dia harus bekerja dengan sistem bagi hasil dengan tuan tanah pada tanah pertanian seluas 0,7 hektar (*Kompas* 2011:49-53). Sistem bagi hasil di Flores umumnya mengikuti pola 6:4 atau 5:5, yang berarti 40% atau 50% dari penghasilan harus diserahkan kepada tuan tanah (Tolo 2014). Jika para petani tuna kisma tidak memperoleh lahan garapan dalam sistem bagi hasil, mereka akan bekerja sebagai pekerja harian lepas dengan upah harian sebesar Rp25.000-Rp30.000 (*Kompas* 2011).

Akibat kurangnya lahan garapan, banyak petani di Flores yang memutuskan untuk merantau sebagai buruh migran ke Malaysia. Pada tahun 2013, jumlah buruh migran asal NTT, terutama dari Flores, di Malaysia sebanyak 75 ribu bersatus ilegal dan 32 ribu bersatus legal (*Timor Express* 2013). Migrasi ke Malaysia sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu cara dari penduduk yang berstatus tuna kisma Flores untuk merespons eksploitasi yang mereka alami. Hal ini membenarkan pernyataan More (1978) seperti yang dikutip oleh Scott (1985:245): “[s]epanjang abad salah satu respon yang paling sering dan efektif orang-orang biasa terhadap penindasan adalah pelarian (*flight*).” Seperti yang jamak terjadi dalam sejarah kehidupan sosial di Asia Tenggara (Scott 1985), sejumlah penduduk Flores lebih memilih “melarikan diri” ke Malaysia untuk menjadi TKI daripada berjuang menuntut reformasi agraria. Selain bermigrasi keluar dari Flores, tidak sedikit pula penduduk Flores yang terlempar dari sektor agraria menganggur atau berkerja pada sektor informal. Pada tahun 2014, jumlah pengangguran di NTT sebanyak 73,2 ribu orang, dan dari total 2,24 juta angkatan kerja di NTT, 78,91% bekerja di sektor informal (BPS NTT 2015).

Kondisi ketimpangan agraria di Flores telah membuka peluang lebih besar bagi kalangan aristokrat tradisional untuk melakukan

mobilitas sosial. Dengan menyatakan diri sebagai tuan tanah pasca peninggalan kolonialisme, para aristokrat tradisional dan keluarganya berhak menguasai tanah ulayat puluhan hektar sebagai hak pribadi. Dengan kekuatan ekonomi politik ini, golongan aristokrat tradisional mampu menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi. Bahkan, golongan aristokrat tradisional ini memiliki “hamba sahaya” yang bekerja untuk kepentingan pendidikan anak-anak mereka. Gereja Katolik yang tetap tinggal dan berkembang di Flores pasca peninggalan kolonialisme sudah sejak awal memiliki misi untuk membangun koalisi pragmatis dengan golongan aristokrat tradisional ini untuk kepentingan ekonomi politiknya sendiri. Koalisi pragmatis itu dilakukan dengan merekrut dan mendidik anak-anak dari golongan aristokrat tradisional untuk bersekolah di sekolah bermutu rintisan Gereja Katolik (Molnar 1997). Alhasil, kalangan terdidik di Flores yang menempati posisi strategis di institusi birokrasi, politik, dan Gereja Katolik hari ini sebagian besar berasal dari keturunan aristokrat tradisional (Jalong 2011).

Karena dewasa ini tanah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ekonomi dan politik seperti di masa lalu, para golongan aristokrat tradisional yang berkuasa di Flores hari ini melihat institusi politik dan birokrasi, bahkan institusi Gereja Katolik (Erb 2006), sebagai “sumber ekonomi dan politik baru” agar bisa terus mereproduksi kekuasaannya (Lele 2012). Korupsi di Flores sering terjadi baik di kalangan birokrasi, politik, maupun Gereja Katolik (Erb 2006). Berdasarkan survei Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 2015, provinsi NTT merupakan provinsi terkorup kedua di Indonesia setelah Sumatera Utara. Pada tahun 2007, Maumere, misalnya, pernah menjadi kota terkorup di Indonesia (Hardum 2016). Oleh karena itu, sekitar 97% dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah lokal di Flores –yang digelontorkan oleh pemerintah pusat– menjadi sumber daya ekonomi yang “diperebutkan” para birokrat dan politisi (Obon 2007; *Kompas* 2011). Persekongkolan antara pemimpin birokrasi, politisi dan pengusaha menjadi hal lumrah dan lazim. Pada tahun 2016, persekongkolan itu terjadi dalam penyelenggaraan balapan sepeda internasional Tour de Flores. Untuk membiayai kegiatan ini, pemerintah daerah di Flores menyediakan dana 9,5 miliar rupiah yang dipotong dari dana APBD yang sejatinya tidak memiliki komponen pengeluaran untuk Tour de

Flores (Tolo 2016). Namun, walaupun korupsi jamak terjadi, hampir jarang terdengar sikap kritis dan protes dari massa rakyat di Flores.

Dalam kaitannya dengan korupsi, Gereja Katolik kerap mendapat dana dari lingkaran birokrasi dan politik melalui apa yang penulis sebut sebagai “politik saling menunggangi.” Dalam rehabilitasi Gereja Katolik Paroki St. Fransiskus Boawae, misalnya, pemerintah Nagekeo menyumbang dana sebesar 75 juta rupiah¹⁰. Sumbangan material dan keuangan seperti ini biasanya meningkat menjelang pemilihan umum daerah dan nasional. Kontrak pemberian izin, seperti hak guna usaha (HGU) lahan pertanian, kerap diperoleh pihak Gereja Katolik karena difasilitasi oleh pemerintah daerah (Dolu 2016). Sebagai imbalannya, lembaga birokrasi dan politik mendapatkan dukungan politik dari Gereja Katolik. Seringkali dukungan politik Gereja Katolik harus dibayar mahal dengan terjadinya penyingkiran dan penindasan penduduk, seperti yang terjadi di Manggarai (Erb 2006, Prior 2004, Prior 2013) dan di Maumere (Dolu 2016, Prior 2013).

Seiring dengan menipisnya sumbangan dana dari Gereja Katolik Eropa, politik saling menunggangi ini meningkat sejak Gereja Katolik memperkenalkan konsep “Gereja Mandiri”¹¹ pada awal tahun 1980-an di Flores (Erb 2006, Boelaars 2005 [1991]). Kekurangan bantuan dana dan personel dari Eropa membuat Gereja Katolik Flores mengalami kesulitan untuk mengentaskan kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan sosialnya. Padahal, kesejahteraan ekonomi penduduk Flores merupakan prasyarat bagi keberadaan Gereja Katolik. Untuk mengatasi persoalan ini, Gereja Katolik tidak mengupayakan perbaikan struktural, terutama dalam mengatasi ketimpangan struktur agraria, tetapi malah memperkenalkan koperasi kredit yang justru semakin meningkatkan jurang antara ‘yang kaya’ dan ‘yang miskin’ di Flores seperti yang terjadi hari ini. Di Ngada, misalnya,

¹⁰Data ini diperoleh dari surat edaran laporan keuangan pembangunan rehabilitasi paroki St. Fransiskus Boawae tahun 2013.

¹¹Mengenai pengertian Gereja Mandiri di sini, penulis mengikuti penjelasan Boelaars (1991 [2005]: 104, catatan kaki No. 3) sebagai berikut: “[p]engertian “Gereja mandiri” jangan diartikan “otonom”, tanpa ikatan lagi dengan Gereja semesta. Pada tahun 1961 didirikan hierarki gerejawi di Indonesia, Gereja Indonesia menurut Hukum Gereja bukan “daerah misi” lagi, dengan kata lain “mandiri”, terlepas dari Belanda, tetapi tidak terlepas dari Gereja semesta”. Dalam pengertian ini, seperti yang ditulis Erb (2006: 2008), Gereja Katolik Flores, “[p]ada tahun 1980an [...] tidak lagi bergantung pada bantuan dari misionaris Eropa dalam kaitan dengan bantuan keuangan dan personel.”

koperasi kredit Sangosai didirikan atas inisiatif Gereja Katolik pada 28 Mei 1983 dengan modal awal 3,6 juta rupiah dan beranggotakan 67 orang. Pada tahun 2014, koperasi kredit Sangosai beranggotakan 23.968 orang dengan total aset Rp287.579.810.194 (Tolo 2013b). Di Manggarai, Gereja Katolik juga mendorong 76 parokinya untuk mendirikan koperasi kredit yang bernaung di bawah Komisi Pemberdayaan Ekonomi Sosial (PES) keuskupan Ruteng.

Pada tahun 2012, terdapat 85 koperasi di bawah PES dengan jumlah anggota sebanyak 22.547 orang dan aset sebesar Rp37,57 milyar (Nama 2011; 2012). Namun, meski Flores menjadi “lumbung koperasi” di bawah naungan Gereja Katolik, kemiskinan masih tetap menjadi persoalan krusial sehari-hari di Flores. Keberadaan koperasi kredit ini justru semakin memiskinkan massa rakyat Flores. Pada tahun 2009, di Flores terdapat 454 buah koperasi kredit. Sementara itu, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende memiliki koperasi kredit terbanyak yakni 101 dan 82, tetapi serentak diikuti oleh persentase kemiskinan sebesar 13,38% dan 21,65%. Sementara itu, Nagekeo dan Ngada yang jumlah koperasi kreditnya hampir dua kali lipat lebih rendah dari dua kabupaten terdahulu memiliki angka kemiskinan yang relatif lebih sedikit, yakni 12,70% dan 12,05% (Tolo 2012).

Menurut penulis, selain oleh ketimpangan agraria yang menjadi persoalan utama, terdapat dua alasan di balik persoalan kemiskinan di Flores. Pertama, koperasi kredit di Flores abai terhadap fungsi koperasi sebagai wadah gerakan politis karena sudah dikooptasi oleh Gereja Katolik. Kedua, koperasi kredit di Flores acuh terhadap diferensiasi kelas yang terbentuk akibat ketimpangan struktur agraria. Karena itu, di Flores, rakyat miskin, tuan tanah, dan orang kaya ditempatkan ke dalam satu koperasi kredit di bawah naungan Gereja Katolik. Padahal menurut Aidit (1963:14-15), “[d]alam satu koperasi kredit umpanja adalah keliru djika dihimpun lintah darat dan tani miskin bersama-sama karena kepentingan mereka sangat berbeda, bahkan bertentangan.” Dengan demikian, koperasi kredit tak ubahnya bank-bank kapitalis dan menjadi sarana untuk “mengisap” massa rakyat miskin untuk kepentingan golongan kelas berkuasa dan bermodal di Flores hari ini.

DEPOLITISASI MASSA RAKYAT

Di tengah ketimpangan struktur agraria di atas, mayoritas massa rakyat Flores tidak memiliki kesadaran terhadap politik. Hal ini disebabkan oleh kesuksesan proyek depolitisasi yang sudah berurat akar sejak lama yang dilakukan oleh aristokrat tradisional, pemerintahan kolonial, Gereja Katolik, dan pemerintahan nasional melalui penumpasan gerakan PKI pasca G30S 1965. Dengan tidak hadirnya pers yang kritis dan organisasi politis yang revolusioner membuat fakta depolitisasi ini menjadi semakin rumit dan seakan tidak akan pernah lekang dari Flores.

Pada masa penjajahan, kekerasan selalu digunakan untuk meredam gejolak politik yang muncul di Flores. Ketika pemberontakan oleh institusi adat terhadap Belanda di Flores, yang terjadi sejak tahun 1902 sampai 1917 (Dhakidae 2013), sudah ditaklukkan, para aristokrat tradisional dikooptasi dan diangkat untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan swapraja otonom di bawah pengawasan Belanda (Bekum 1946 [1974]); Gordon 1975; Dhakidae 2013). Gereja Katolik masuk ke Flores dalam payung Politik Etis bukan hanya bertujuan untuk melanggengkan akumulasi melalui perampasan (Dhakidae 2003; Li 2007; Samuel 2010), tetapi juga untuk memperluas “kedaulatan atas tanah” milik Belanda di Hindia Belanda, khususnya di daerah luar Jawa. Perluasan kekuasaan Belanda ini tidak dilakukan melalui kekuatan militer, tetapi dengan agenda kebijakan sosial pemberdayaan Politik Etis, karena dengan meningkatnya perjuangan nasionalisme, intervensi perluasan kekuasaan politik dan ekonomi Belanda melalui “cara-cara militer” dilihat sudah tidak relevan (Locher-Scholten 1981 [1996]:246, 251). Dalam hal itu, Dhakidae (2013:126) sangat tepat menggambarkan Flores yang sudah tunduk pada kolonialisme Belanda dan Gereja Katolik yang bernaung pada Politik Etis pada tahun 1934¹² sebagai “Flores yang sudah jinak seperti bunga”.

Flores yang sudah “jinak” secara politik ini merupakan keuntungan

¹²Menurut Locher-Scholten (1981 [1996]), ada beberapa kalangan yang berpendapat bahwa kebijakan Politik Etis sudah berakhir pada tahun 1920-an, tetapi ada juga kalangan yang berpendapat bahwa kebijakan Politik Etis tetap dijalankan sampai tahun 1942 karena kebijakan sosial Belanda tetap dilaksanakan di Indonesia sampai tahun 1942. Dalam konteks Flores, penulis lebih sepakat dengan pendapat yang terakhir ini.

bagi Jepang yang datang menggeser kekuasaan Belanda di Flores pada awal tahun 1940-an. Jepang secara cerdas memanfaatkan Gereja Katolik Flores untuk kepentingan proyek kolonisasinya. Kapten Tasuku Sato—seorang Komandan Angkatan Laut Kekaisaran Nippon yang mengemban tugas di Flores pada perang dunia kedua—pernah menggambarkan massa rakyat Flores pada tahun 1940-an yang patuh dan taat secara politik walaupun hidup dalam ketertekanan ekonomi dan politik sebagai berikut: “[k]ehidupan sosial, pendidikan, dan sikap hidup rakyat di pulau ini erat terkait dengan agama Katolik. Situasi aman damai yang kita temui di sini bukan mustahil diakibatkan oleh pengaruh dan ajaran gereja” (Sato dan Tennien 1976 [1957]:145).

Setelah Belanda secara resmi menarik kekuasaannya di Indonesia pada tahun 1949, pada tahun 1950an, di Flores, Gereja Katolik melakukan apa yang Gordon (1975:72) sebut sebagai *catholicize the adat*. Untuk melakukan hal ini, Gereja Katolik tidak saja membangun jaringan sosial, ekonomi, dan politik dengan kalangan aristokrat tradisional, tetapi juga dengan massa rakyat di tingkat akar rumput (Prior 2011). Gereja Katolik meneruskan kebijakan kooptasi raja-raja yang dijalankan pemerintah kolonial (Klinken 2015a:195). Dalam proses ini, Gereja Katolik perlahan menghancurkan peran sosial, kultural, dan agama institusi tradisional setempat (Erb 2010; Allerton 2003). Ketika posisi institusi adat sudah semakin lemah, Gereja Katolik lalu mengambil alih posisi dan fungsi institusi adat setempat dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Tetapi sejatinya, sebelum ditaklukkan oleh kolonialisme dan Gereja Katolik, institusi adat di Flores juga pernah dan bahkan hingga kini masih terus mendepolitisasi massa rakyat Flores dengan otoritas religius dan kultural yang masih tersisa, yakni melalui hikayat rakyat dan terminologi adat (Tule 2006).

Depolitisasi massa rakyat Flores semakin efektif ketika misionaris Gereja Katolik awal kerap kali sibuk “memanjakan” massa rakyat dengan pembangunan infrastruktur fisik dan kemudahan material daripada memberikan ajaran Katolik yang kokoh. Erb (2006:210) menulis bahwa “[k]ekatolikan di Flores tidak ditanam secara baik. Para misionaris awal lebih berkonsentrasi pada pembangunan konstruksi fisik. Dan berbagai bantuan dari luar negeri telah menjadikan orang Flores sebagai “tukang minta-minta”. Dengan keberhasilannya mendepolitisasi massa rakyat Flores, sistem pemerintahan lokal yang baru terbentuk, harus merangkul Gereja Katolik untuk memperoleh

legitimasi politik. Karena kedekatan seperti ini, Gereja Katolik cenderung menjadi tidak kritis terhadap kinerja buruk pemerintah lokal. Misalnya, pada awal tahun 2000-an, Gereja Katolik pernah “digunakan” untuk melegitimasi kesewenang-wenangan dan kekerasan pemerintah lokal Manggarai terhadap para petani kopi yang dituduh mencaplok dan menduduki hutan negara pada masa kekuasaan Bupati Anton Bagul Dagur dan Uskup Eduardus Sangsun (Prior 2004; Erb 2006).

Pasca tragedi G30S 1965, depolitisasi massa rakyat Flores menjadi semakin masif dan sistematis melalui teror dan kekerasan yang dilegitimasi oleh negara. Banyak anggota PKI dan simpatisannya di Flores yang pada saat itu getol berjuang melawan feodalisme, tuan tanah, dan menuntut reformasi agraria dibunuh dan dipenjara tanpa tata cara peradilan yang berlaku. Pembunuhan ini tidak saja mendapat legitimasi negara, tetapi juga dibiarkan terjadi oleh Gereja Katolik (Prior 2011; Madung dan Prior 2015) yang kala itu sudah menjadi tuan tanah besar di Flores (Prior 2013; Tolo 2016). Gereja Protestan juga melakukan hal yang sama. Bahkan, gedung Gereja Protestan di Timor dijadikan sebagai tempat penampungan korban sebelum dibantai, dan para pembantai mendapat tempat sebagai pahlawan dalam institusi Gereja Protestan (Klinken 2015b; Kolimon 2015). Alhasil, paling sedikit 2.000 dan paling banyak 13.600 orang NTT, termasuk Flores, yang dibunuh kala itu (Kolimon et al. 2012; Klinken 2015a:310).

Pasca pembantaian 1965, para petani di Flores yang menuntut keadilan agraria kerap kali dicap sebagai PKI dengan konsekuensi dibunuh dan dipenjara tanpa tata cara peradilan yang berlaku. Seperti pada level nasional, ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan, massa rakyat desa dilarang berpolitik agar dapat menyibukan diri dengan urusan pembangunan, kerja, dan produksi (Lucas 1992; Antlove 2003; Lane 2013). Dalam imajinasi politik Suharto, massa rakyat yang “jinak” ini, oleh Lane (2014:20) disebut: “massa mengambang” –rakyat yang tidak boleh dimobilisasi dan dipolitisasi. Akibatnya, para petani tak bertanah di pedesaan di Flores tidak berani melakukan gerakan perlawanan untuk menuntut keadilan agraria kepada penguasa dan kaum bermodal, seperti yang terjadi sebelum tragedi G30S 1965. Ketimpangan agraria dilihat sebagai *datum* (fakta terberi) yang tidak boleh diotak-atik oleh siapapun.

Dalam kondisi seperti ini, karena berpegang pada prinsip kehati-hatian,¹³ pers Gereja Katolik yang sudah mengakar lama sejak masa penjajahan dalam kehidupan massa rakyat Flores kurang kritis terhadap kekuasaan dan ketidakadilan dan enggan menjalankan fungsi politiknya. Misalnya, pasca pembantaian dan pembersihan PKI di Flores pada tahun 1966, pers Gereja Katolik cenderung mendukung agenda “pembersihan” PKI, satu-satunya partai politik yang bersikap kritis terhadap kekuasaan para tuan tanah dan pemerintah lokal di Flores kala itu (Klinken 2015b). Hanya satu bulan setelah penerbitannya pada tanggal 24 oktober 1974, *Dian* edisi 24 September 1974 mempublikasikan sebuah foto pembakaran dokumen PKI dengan tulisan propaganda-diskriminatif di bawahnya: “Upacara pembakaran dokumen komunis: biar tidak dibaca oleh yang tidak berhak” (Klinken 2015a:73). Nada propaganda-diskriminatif anti PKI dan, tentunya, antidemokrasi yang dilakukan *Dian* ini seolah membatalkan sikap Gereja Katolik Indonesia pada tahun 1966 yang menyesal karena telah melakukan “kelalaian-kelalaian maupun pandangan-pandangan yang kurang kritis” dalam menghadapi tragedi kemanusiaan pasca G30S 1965 (Boelaars 2005 [1991]:149; Prior 2011).

PERLAWANAN SPONTAN

Berhadapan dengan fakta depolitisasi dan kesulitan ekonomi, tidak berarti tidak ada perlawanan sama sekali terhadap eksploitasi baik secara fisik maupun kultural yang dilakukan penguasa dan kaum bermodal di Flores. Upaya untuk melakukan hegemonisasi¹⁴ dan normalisasi terhadap kehidupan massa rakyat di Flores oleh kolonialisme, aristokrat tradisional, pemerintah lokal dan Gereja

¹³Hal ini kurang lebih dibenarkan oleh apa yang ditulis oleh Hurek (2011) yang mewawancarai Alex Beding, pendiri *Dian*, sebagai berikut: “[p]rinsip kehati-hatian ala pastor-pastor SVD benar-benar diterapkan Pater Alex Beding dalam mengelola *Dian*. Karena itu, dalam usianya yang hampir mencapai 30 tahun, *Dian* tak pernah menghadapi masalah dengan pemerintah. Pun tidak ada gugatan ke pengadilan atau gangguan terhadap wartawan dan korespondennya.”

¹⁴Dominasi kelas berkuasa yang tidak saja melalui *means of physical production*, tetapi juga melalui *means of symbolic production*, oleh Gramsci (1971) sebut sebagai hegemoni. Dalam konteks inilah penulis menggunakan kata hegemoni.

Katolik, seperti teori kepengaturan Foucault yang dijelaskan oleh Li (2012:36), mengalami keterbatasan-keterbatasan yang tak terhindarkan akibat “diagnosis tidak lengkap” karena “kesenjangan ekonomi-politik disisihkan dari perencanaan yang bersifat teknis dan sempit.” Salah satu keterbatasan yang paling nyata hari ini adalah tidak terealisasinya kesejahteraan massa rakyat Flores. Hingga tahun 2010, Flores masih menjadi pulau yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Menurut data BPS (2010), dari 1,8 juta jiwa, terdapat 330.380 (17.33%) penduduk miskin. Rata-rata jumlah kemiskinan di Flores ini jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional (13.33%). Dalam kaitannya dengan perlawanan terhadap hegemoni dan proses normalisasi di Flores, penulis lebih sepakat dengan Scott (1985:317) yang “mengoreksi” konsep hegemoninya Gramsci (1971) yang cenderung mengabaikan kemampuan kelas yang dikuasai untuk melawan hegemoni ideologi kelas berkuasa. Sebaliknya, sejalan dengan Scott (1985), menurut penulis, selain oleh keterbatasan-keterbatasan ekonomi, kegagalan dominasi kolonialisme, aristokrat tradisional, pemerintah lokal, dan Gereja Katolik, juga disebabkan oleh kemampuan massa rakyat Flores yang dengan pengalaman hidupnya sehari-hari melakukan penetrasi dan demistifikasi terhadap ideologi hegemonis kelas berkuasa.

Dalam koridor politik “saling menunggangi”, pembangunan di Flores yang dilakukan oleh Gereja Katolik dan pemerintah lokal sejauh ini selalu bersifat reformis dengan pengaruh pendekatan modernis yang kuat, yang dalam bahasa Li (2012:12) disebut “teknikalisasi permasalahan”. Teknikalisasi permasalahan kemiskinan di Flores ini dirancang sedemikian rupa agar tidak mengganggu kepentingan ekonomi politik kedua pihak: Gereja Katolik dan pemerintah lokal. Oleh karena itu, Gereja Katolik sejak awal kedatangannya gencar “memodernisasikan” Flores melalui pendidikan Eropa dan cenderung menghindari pembenahan persoalan ekonomi politik yang berkaitan dengan struktur sosial, ekonomi, dan politik. Alhasil, upaya Gereja Katolik untuk mengeluarkan massa rakyat Flores dari lingkaran setan kemiskinan melalui jalur pendidikan modern tidak terealisasi hingga kini, malah banyak penduduk Flores yang berpendidikan keluar dari Flores karena ketiadaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan taraf pendidikan mereka (Erb 2006).

Dengan adanya keinginan Gereja Katolik untuk mengooptasi penguasa tradisional demi kepentingan ekonomi politik, sejak awal

pendidikan Katolik di Flores ditujukan pada golongan elite aristokrat tradisional (Molnar 1997). Golongan elite berpendidikan ini, entah yang pergi meninggalkan Flores ataupun yang tetap tinggal di Flores, tidak memiliki keinginan untuk melakukan perbaikan terhadap ketimpangan struktural yang mengakar di Flores. Li (2012:21) menyebut persoalan ketimpangan ini sebagai persoalan “ekonomi-politik”. Sama halnya dengan kesimpulan Samuel (2010:140) pada level nasional, dengan hanya membuka peluang bagi lapisan kelas atas untuk mengenyam pendidikan, di Flores lahirlah sebagian besar golongan intelektual yang bersikap apolitis dan acuh terhadap kondisi ekonomi politik mayoritas massa rakyat Flores yang hidup dalam kemiskinan.¹⁵ Fakta di Flores ini menjadi suatu aksioma untuk intelektual Indonesia—seperti Samuel (2010:143) yang mengutip Anderson (1983): “... Indonesia pascakolonial dalam berbagai dimensi semakin menyerupai negara kolonial yang telah dienyahkannya.” Aksioma ini menurut penulis berlaku di Flores hingga hari ini.

Dengan kondisi ekonomi politik yang terdepolitisasi, ketiadaan organisasi politis yang revolusioner, ketumpulan pers, dan nihilnya peran intelektual, bagaimana bisa menjelaskan “perlawanan spontan” massa rakyat Flores. Bagaimana pembangkangan terhadap depolitisasi itu bisa terjadi di Flores? Berdasarkan konsep emansipasi diri Marx, seperti ditulis oleh Levant (2012:369) bahwa “massa rakyat menjadi diberdayakan dan radikal oleh pengalaman pribadi yang berpartisipasi dalam perjuangan, dan melalui proses ini mereka akan mengembangkan kapasitas, kesadaran, dan persatuan yang diperlukan untuk mengemansipasi diri mereka sendiri.” Menurut Rosa Luxemburg, perjuangan untuk meruntuhkan kapitalisme ini mestinya terjadi secara spontan sebagai akibat otomatis dari kontradiksi-kontradiksi internal kapitalisme. Dengan demikian, menurut Luxemburg, perlawanan kelas pekerja bisa dan sebaiknya muncul secara spontan tanpa sebuah organisasi atau partai pelopor seperti yang diserukan oleh Vladimir Lenin untuk mengatasi paham

¹⁵Hal ini persis dialami oleh PKI yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit pada awal tahun 1950an yang gagal menggalang kekuatan dari kalangan intelektual yang umumnya berasal dari lapisan sosial menengah ke atas. Alih-alih memilih bergabung dengan PKI, para intelektual ini memandang bahwa “PNI, Masyumi, atau Partai Sosialis tampak lebih menarik karena partai-partai ini memungkinkan mereka untuk berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai latar belakang keluarga yang sama” (Samuel 2010:140-141).

ekonomistis Karl Marx. Lenin, juga Leon Trotsky, menekankan pentingnya peran organisasi atau partai pelopor sosialis untuk menggerakkan dan mempercepat perlawanan revolusioner terhadap kapitalisme (Levant 2012).

Dalam konteks Flores, tesis Luxemburg menjadi aktual berkaitan dengan “perlawanan spontan” massa rakyat Flores terhadap kaum bermodal, aristokrat tradisional, pemerintah lokal, dan Gereja Katolik. Pengalaman kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dan politik akibat kontradiksi-kontradiksi dalam struktur ekonomi dan politik secara spontan telah menyulut perlawanan massa rakyat Flores terhadap otoritas tuan tanah, aristokrat tradisional, pemerintah lokal, kaum bermodal, dan Gereja Katolik. Seperti yang ditulis E.P Thomson dalam konteks pemberontakan akibat kelangkaan makanan di Inggris pada abad 18 (dalam Levant 2012:377), dalam konteks Flores, kesenjangan ekonomi bukan menjadi alasan tunggal perlawanan spontan, tetapi juga didorong oleh kesadaran dan keyakinan mereka untuk “mempertahankan hak-hak tradisional atau adat.” Dengan karakternya yang spontan, harus diakui perlawanan ini memiliki karakter yang temporer-sporadis-fragmentaris. Atas dasar ini, menurut penulis, signifikansi kehadiran organisasi yang berkarakter progresif-revolusioner di Flores menjadi aktual seperti seruan Lenin dan Trotsky.

Sejak pasifikasi yang dilakukan oleh Belanda tahun 1917, hampir jarang terdengar perlawanan dan pemberontakan fisik yang terorganisasi terhadap kolonialisme, aristokrat tradisional, pemerintah lokal, dan Gereja Katolik. Perlawanan spontan hanya dilakukan melalui dua bentuk. Perlawanan spontan pertama dilakukan melalui penyebaran rumor tentang penculikan dan perburuan kepala manusia di Flores kepada Gereja Katolik, terutama kepada para misionaris Katolik Eropa (Erb 1991). Bentuk perlawanan spontan seperti ini sering terjadi di Indonesia seperti yang ditulis oleh Drakes (1989) di Kalimantan, bahkan sudah terjadi sejak tahun 1930-an seperti yang tulis oleh Soetan Sjahrir (1949) yang dikutip oleh Barnes (1993). Perlawanan spontan seperti ini kerap muncul dalam pelbagai bentuk pada masa otoriter Orde Baru melalui “lelucon, sindiran, dan bisik-bisik” (Li 2012:44). Di Flores, Erb (1991) berkesimpulan bahwa rumor tentang penculikan dan perburuan kepala manusia disebar sebagai “senjata ideologis” untuk membangkang terhadap ketimpangan ekonomi politik antara Gereja Katolik dan

massa rakyat Flores yang sudah mengakar sejak zaman kolonial. Erb (1991:124) menulis bahwa di Flores "...kekuasaan, terutama yang ditunjukkan oleh kekayaan, sudah sejak berpuluh-puluh tahun berpusat pada tangan para imam Gereja Katolik yang berasal dari Eropa." Tetapi, kehadiran imam Eropa di Gereja Katolik ini telah menimbulkan sikap ambigu bagi massa rakyat Flores, sebab walaupun dialami sebagai representasi dari kolonialisme yang eksploitatif, Gereja Katolik juga pernah memberikan bantuan finansial dan material kepada massa rakyat Flores (Erb 1991; Erb 2006). Sikap ambigu massa rakyat Flores ini persis seperti dialami oleh orang miskin di Sedeka, Malaysia. Dalam penelitian Scott (1985), kaum miskin di Sedeka ini cenderung patuh dan tidak melawan secara frontal kepada petani kaya yang mengeksploitasi mereka karena petani kaya kerap memberikan mereka bantuan sosial, seperti sedekah, kenaikan gaji, dan zakat yang dianggap sebagai tuntutan dan kewajiban sosial.

Bentuk kedua dari perlawanan spontan melalui aksi massa yang tidak terorganisasi seperti yang terjadi sejak awal tahun 2000-an,¹⁶ setelah jatuhnya pemerintah otoriter Orde Baru.¹⁷ Di Manggarai, massa rakyat Colol membangkang dan melawan pemerintah lokal yang menebang ribuan pohon kopi milik massa rakyat petani, yang menurut pemerintah lokal ditanam di kawasan hutan lindung. Dalam perlawanan spontan ini, ketika melakukan aksi massa di depan kantor polisi di Ruteng, massa rakyat petani tewas ditembak

¹⁶Akibat dari perlawanan melalui aksi massa seperti ini, dari tahun 2001-2003 saja, terdapat 123 konflik agraria yang menyebabkan 26 korban jiwa di lima kabupaten di Flores, yakni Ende, Flores Timur, Manggarai, Ngada, dan Sikka (Clark 2004:7).

¹⁷Meski demikian, harus diakui bahwa pada tahun 1950-an dan 1960-an pernah ada perlawanan yang terorganisasi di bawah kendali PKI dan Barisan Tani Indonesia melalui aksi massa kepada tuan tanah dan pemerintah di Flores (Klinken 2015a). Tetapi, perlawanan terorganisasi ini dipadamkan secara kejam melalui pembantaian pasca G30S 1965. Pembantaian pasca G30S 1965 di Indonesia yang dilakukan secara brutal, selain untuk menebarkan teror psikologis kepada massa rakyat politis, juga bertujuan pertamanya untuk memadamkan gerakan revolusi nasional yang sudah hampir mencapai hasilnya di tahun 1960an (Lane 2013). Pembantaian terjadi di Flores di mana gerakan perlawanan terhadap tuan tanah dan pemerintah yang bobrok sedang tumbuh dan berkembang. Jan Djong, seorang politisi enerjik yang pernah melawan sikap otoriter raja Sikka kala itu, pada awal Februari 1966 tewas di penjara dengan tubuh penuh luka akibat dipukul dan disiksa setelah diarak keliling kota Maumere dengan hanya memakai kolor (Klinken 2015b). Di Ende, Klinken (2015a: 82) "menemukan lokasi tempat sorang komunis lokal terkemuka bernama John Timu dibakar hidup-hidup di depan umum."

polisi dan puluhan lainnya luka parah, disiksa, dan dipenjara (Prior 2004; Prior 2013). Di Galak Rego dan Satar Teuk Reo, pada awal tahun 2000-an, massa rakyat melawan investor tambang PT. Surya yang menyewa militer untuk menghalau massa rakyat yang sedang memblokir jalan menuju areal pertambangan yang merupakan tanah ulayat mereka (Tolo 2013a). Pada tahun 2016, massa rakyat adat Tana Ai di Maumere membangkang melawan Gereja Katolik dan pemerintah Sikka yang didukung oleh kekuatan personel polisi dan militer dengan menolak diusir dari tanah ulayat mereka. Mereka melakukan aksi massa dan mendatangi kantor Bupati Sikka untuk memprotes kebijakan pemerintah Sikka ini. Alasan di balik pengusiran ini adalah untuk merampas tanah *ulayat* massa rakyat Tana Ai demi kepentingan pembangunan infrastruktur publik pemerintah Sikka dan perkebunan kelapa milik Gereja Katolik. Apa yang dibuat oleh Gereja Katolik dan pemerintah Sikka ini persis seperti yang dilakukan Belanda kepada massa rakyat adat Tana Ai pada tahun 1860-an melalui pengusiran lahan yang sama untuk menanam kapas dan kelapa (Dolu 2016; Prior 2013).

Kedua jenis perlawanan spontan massa rakyat Flores ini belum mencapai hasil yang maksimal sebab gerakan yang bersifat spontan ini cepat dan mudah dipadamkan oleh Gereja Katolik dan aparatus negara (Prior 2004; Regus 2011; Prior 2013; Tolo 2013a). Melalui teknik kooptasi dan negosiasi, Gereja Katolik seringkali dengan mudah mematahkan perlawanan spontan massa rakyat Flores. Bila teknik kooptasi dan negosiasi gagal, Gereja Katolik biasa mengambil jalan aliansi dengan pemerintah lokal, seperti yang terjadi pada kasus perampasan tanah ulayat di Maumere (Dolu 2016) dan di Manggarai (Prior 2004; Prior 2013; Tolo 2013a). Di Flores, pasca Orde Baru, walaupun pengaruh militer, baik secara ekonomi maupun politik berkurang, tetapi mereka masih memainkan peran-peran penting dalam bidang ekonomi dan politik dengan tindak koersif-represif yang merugikan massa rakyat, seperti lazimnya masih terjadi di Indonesia hingga kini (Tolo 2013a; Lane 2013; Aspinal 2010). Ketika dihadapkan dengan kooptasi Gereja Katolik dan kekuatan aparatus negara, umumnya gerakan spontan massa rakyat menjadi lemah, terfragmentasi, dan bahkan menghilang. Tanpa organisasi politik progresif-revolusioner yang permanen, gerakan perlawanan spontan massa rakyat Flores belum mencapai hasil yang efektif untuk melawan proyek depolitisasi kaum berkuasa dan bermodal. Namun, walaupun

ketiadaan organisasi politik progresif-revolusioner yang permanen, energi massa rakyat ini belum pernah tersalurkan menjadi kerusuhan di Flores, sebagaimana terjadi di tempat-tempat lain di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru.¹⁸ Dengan demikian, tesis Lane (2013:139) bahwa dampak dari “deorganisasi” dan “disorganisasi” adalah munculnya bentuk protes baru berupa “kerusuhan” tidak terbukti di Flores sejauh ini.

KESIMPULAN

Tulisan ini sudah memberikan penjelasan bahwa kemiskinan di Flores dewasa ini disebabkan oleh akumulasi melalui perampasan, yakni sejarah penjajahan yang panjang, ketimpangan struktur agraria, dan depolitisasi massa rakyat. Hal ini berarti persoalan kemiskinan di Flores merupakan “persoalan ekonomi-politik” (Li 2007), bukan “persoalan psikologis-kultural” (Budiman 1990; Wuryandari 2014). Akumulasi melalui perampasan merupakan akar dari persoalan kemiskinan di Flores. Pemegang kekuasaan dalam ranah birokrasi, politik, dan Gereja Katolik merupakan golongan aristokrat tradisional yang berhasil melakukan mobilisasi sosial melalui akumulasi melalui perampasan. Dengan demikian, selain membantah kajian akademik LIPI tentang kemiskinan di NTT (Wuryandari 2014), tulisan ini menyajikan tesis yang berbeda dengan Klinken (2015a) bahwa setelah kemerdekaan Indonesia dan pasca pembantaian G30S 1965 golongan aristokrat tradisional tersingkir dari ranah birokrasi, politik, dan institusi agama di NTT.

Sebagai persoalan ekonomi-politik, kemiskinan di Flores tidak bisa diatasi hanya dengan perbaikan yang bersifat teknis, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembenahan kelembagaan, dan intervensi teknologi-pengetahuan seperti yang disarankan oleh peneliti LIPI (Wuryandari 2014). Sejauh ini, sejak masa kolonial, pembangunan di Flores hanya berkulat dengan perbaikan yang bersifat teknis. Melihat formasi ekonomi politik di Flores saat ini, rencana untuk menjadikan kemiskinan sebagai

¹⁸Lane (2013:139) mendefinisikan kerusuhan sebagai “kemarahan spontan yang terbentuk dalam serangan kekerasan terhadap toko-toko yang menjual barang-barang mewah, kantor-kantor pemerintah, dan simbol-simbol gaya hidup yang asing dari *enklave* ekonomi.”

persoalan “ekonomi-politik” tidak bisa mengharapkan *political will* dari pemerintah dan Gereja Katolik. Dengan memanfaatkan momentum “perlawanan spontan” yang sudah dan sedang tumbuh, agenda ini harus merupakan perjuangan massa rakyat Flores sendiri. Menurut Gramsci (1971), perlawanan spontan merupakan cikal bakal dari lahirnya organisasi politis yang revolusioner. Dengan organisasi politis, massa rakyat Flores mampu melawan proyek depolitisasi kelas berkuasa dan bermodal dewasa ini. Selain itu, organisasi politik progresif-revolusioner juga dapat memainkan fungsi koordinasi dalam perjuangan massa rakyat Flores untuk menjadikan kemiskinan sebagai persoalan “ekonomi politik”.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidit, D.N. 1963. *Peran Koperasi Dewasa Ini*. Jakarta: Depagitprop CC PKI.
- Allerton, C. 2003, “Authentic Housing, Authentic Culture? Transforming A Village Into a ‘Tourist Site’ in Manggarai, Eastern Indonesia.” *Indonesia and the Malay World* 31(89):119-128.
- Angelis, MDE. 2005. “The Political Economy of Global Neoliberal Governance.” *Review* 28(3):229-257.
- Antlove, H. 2003. “Village Government and Rural Development in Indonesia: the New Democratic Framework.” *Buletin of Indonesia Economic Studies* 39(2):193-214.
- Arndt, P. 1924. *Agama Orang Ngada: Dewa, Roh-roh Manusia dan Dunia*. Maumere: Candraditya.
- Aspinal, Edward. 2010. “Indonesia: The Irony of Success.” *Journal of Democracy* 21(2):20-34.
- Awang, SA. 2005. “Sejarah Pemikiran Pengelolaan Hutan Indonesia.” *Wacana*. Edisi ke-20. Yogyakarta: Insist Press.
- Barnes, R.H. 1993. “Construction Sacrifice, Kidnapping and Head-Hunting Rumors on Flores and Elsewhere in Indonesia.” *Ocenia* 64(2):146-158.
- Bereuh, Daud. 2015. “Masa Depan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM 1998.” Diskusi Mingguan MAP Corner, May 19.
- Bekum WV. 1946. *Sejarah Manggarai (Warloka-Todo-Pongkor)*. Unpublished manuscript.

- Budiman, Arief. 1990. *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka.
- , 1987. *Jalan Demokratis ke Sosialisme: Pengalaman Chili di Bawah Allende*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- , 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bernstein, Henry. 2010. *Class Dynamics of Agrarian Change*. Kanada: Fernwood Publishing.
- Boelaars, H.J.W.M. 1991. *Indonesianisasi: Dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Clark, Samuel. ed. 2004. *More than Just Ownership: Ten Land and Natural Resource Conflict Case Studies from East Java and Flores*. Jakarta: World Bank Report.
- Corta, LD. 2010. "The Political Economy of Agrarian Change: Dinosaur or Phoenix?" Hlm. 18-46 dalam *The Comparative Political Economy of Development: Asia and South Asia*. Disunting oleh Hariss-Barbara White dan Judith Hayer. New York: Routledge.
- Dale, C.J.P. 2013. *Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik. Labuan Bajo*: Sunspirit Books.
- Dhakidae, Daniel. 2003. *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.
- , 2013. "Dari Tempat Pembuangan Menjadi Rumah Pemulihan: Makna Sukarno Bagi Ende dan Ende Bagi Sukarno." *Prisma* 32(2&3):113-146.
- Djawang, Umbu S. et al., ed. 1987. *Mosaik Pariwisata Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat Satu NTT.
- Dolu, H.G. 2016. "Persoalan Tanah Ulayat, Masyarakat Adat Maumere Menanti Keadilan dari Gereja dan Negara." Diakses 22 Agustus 2016 (<http://indonesiasatu.co/detail/persoalan-tanah-ulayat--masyarakat-adat-maumere-menanti-keadilan-dari-gereja-dan-negara>).
- Drake, R.A. 1989. "Construction Sacrifice and Kidnapping Rumor Panics in Borneo." *Oceania* 59(4):269-79.
- Erb, Maribeth. 1991. "Construction Sacrifice, Rumors and Kidnapping Scares in Manggarai: Further Comparative Notes from Flores." *Oceania* 62(2):146-158.

- (2005a). "Shaping a 'New Manggarai': Struggles over culture and tradition in an Eastern Indonesian regency." *Asia Pacific Viewpoint* 46(3):323-334.
- , 2006. "Between Empowerment and Power: The Rise of the Self-Supporting Church in Western Flores, Eastern Indonesia." *Journal of Social Issues in Southeast Asia* 21(2):204-229.
- , 1999. *The Manggaraians: A Guide to Traditional Lifestyles*. Times Editions: Singapore.
- , 2010. "Kebangkitan Adat di Flores Barat: Budaya, Agama dan Tanah." Hlm. 269-299 dalam *Adat dalam Politik Indonesia*. Disunting oleh James S. Davidson et al. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Escobar, Arturo. 1995. *Encountering Development: the Making and Unmaking of The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Ferguson, James. 1990. *The Anti-Politics Machine: "Development," Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fine, B. 2015. "Negara Pembangunan Sudah Mati –Hidup Modal Sosial?" *Jurnal Suluh Pergerakan* 1:59-91.
- Forth, Gregory. 2001. "Dualism and Hierarchy: Processes of Binary Combination in Keo Society." Oxford: Oxford University Press.
- Gordon, J.L. 1975. *The Manggarai: Economic and Social Transformation in an Eastern Indonesia Society*. Disertasi. Cambridge, Massachusetts: Harvard University.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selection from the Prison Notebooks*. New York: International Publisher.
- Hadiz, Vedi R. dan & Dakidae D.,ed. 2006. *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: PT Equinox Publishing Indonesia.
- Hardum, S. E. 2016. "NTT Jadi Fokus Perhatian Kementerian Desa." Diakses 23 Agustus 2016 (<http://www.beritasatu.com/ekonomi/358133-ntt-jadi-fokus-perhatian-kementerian-desa.html>).
- Harvey, David. 2003. *The New Imperialism*. New York: Oxford University Press.
- Hasiman, F. 2014. *Monster Tambang*. Jakarta: JICP OFM.
- Hurek, L. Lusi. 2011. "Alex Beding Pelopor Pers NTT." Laporan wawancara dengan Pater Alex Beding 17 Februari. Diakses 20 Agustus 2016 (<http://hurek.blogspot.co.id/2011/02/alex-beding-pelopor-pers-di-ntt.html>).

- Jalong, Fransiskus. 2001. *Kairos dan Developmentalism: Politik Wacana Patronase di Manggarai*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Jebadu, A. et al., ed. 2009. *Pertambangan di Flores-Lembata: Berkah atau Kutuk?* Maumere: Penerbit Ledalero.
- Klinken, v.G. 2015a. *The Making of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota Kupang, 1930an-1980an*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.
- , 2015b. "Pembunuhan di Maumere." *Jurnal Ledalero* 14(1):9-33.
- Kolimon, M dan Wetangterah, L.,ed. 2012. *Memori-Memori Terlarang Perempuan Korban & Penyintas Tragedi '65 di Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Yayasan Bonet Pinguwir.
- Kolimon, M. 2015. "Pelaku Mencari Kesembuhan." *Jurnal Ledalero* 14(1):34-59.
- Kompas. 2011. "Ekspedisi Jejak Peradaban NTT: Laporan Jurnalistik Kompas." Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Lane, Max. 2013. *Unfinished Nation*. Jakarta: Penerbit Djaman Baroe.
- Lele, G. 2012. "Flores dan Kemiskinan." Wawancara di Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, September 5.
- Levant, A. 2012. "Rethinking Spontaneity Beyond Classical Marxism: Re-reading Luxemburg Through Benjamin, Gramsci and Thompson." *Critique: Journal of Socialist Theory* 40(3):367-387.
- Li, Tania Murray. 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. USA: Duke University Press.
- , 2012. *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Lucas, A. 1992. "Land Dispute in Indonesia: Some Current Perspectives." *Indonesia* 53:79-92.
- Marx, Karl. 1867. *Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik*. Buku 1. Jakarta: Hasta Mitra dan Ultimus.
- Metzner, J. K. 1982. "Agriculture and Population Pressure in Sikka, Isle of Flores: A contribution to the study of the stability of agricultural systems in the wet and dry tropics." *Development Studies Centre Monograph* 28. Australian National University.
- Molnar, A. K. 1997. "Christianity and Traditional Religion among the Hoga Sara of West-Central Flores." *Anthropos* 92:389-408.
- Madung, O. G. dan Prior, J. M. eds. 2015. *Berani Berhenti Berbohong: 50 Tahun Pascaperistiwa 1965-1966*. Maumere: Ledalero, Litbang STFK Ledalero.

- Muda, H. 1986. *The Supreme Being of the Ngadha People in Flores (Indonesia): Its Transcendence and Immanence*. Disertasi. Rome: Pontifica Universita Gregoriana.
- Nama, S. 2012. "Kerasulan Sosial Ekonomi: Bagian Integral Pewartaan Injil, dalam Chen Martin dan Suwendi." Hlm. 53-80 dalam *Budaya & Pergumulan sosial: Refleksi Yubeleum 100 Tahun Gereja Katolik Manggarai*. Disunting oleh Martin Chen dan Charles Suwendi. Jakarta: Obor.
- , 2011. "Koperasi dan Kemiskinan di Flores." Wawancara di Ruteng, November 23.
- Obon, F. 2007. "Mencari Rakyat dalam APBD." Laporan Jurnalistik "Diskusi Tematik Fakultas Ekonomi Universitas Flores: Fenomena Pengelolaan APBD Yang Berpihak Pada Rakyat," Ende, 22 Februari. Diakses 13 Mei 2016 (<http://fransobon.blogspot.co.id/2007/07/mencari-rakyat-dalam-apbd.html>).
- Orinbao, S. 1992. *Tata Berladang Tradisional dan Pertanian Rasional Suku-Bangsa Lio*. Maumere: Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero.
- Osborne, David dan Gaebler, Te. 1996. *Mewirauahakan Birokrasi*. Pustaka Binaman Pressindo: Jakarta.
- Prior, John. 2013. "Land Disputes and the Church: Sobering Thoughts from Flores." pp. 215-242 in: *Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia*. Ohio: Ohio University Press.
- , 2004. "Land, Church, and State." *Inside Indonesia*. Diakses 23 Januari 2016 (<http://www.insideindonesia.org/land-church-and-state>).
- , 2011. "The Silent Scream of a Silenced History." *Exchange* 40:117-43, 311-12
- Regus, M. 2011. "Tambang dan Perlawanan Rakyat: Studi Kasus Tambang di Manggarai, NTT." *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 16(1):1-28.
- Samuel, Hanneman. 2010. *Genealogi Kekuasaan Ilmu Sosial Indonesia: Dari Kolonialisme Belanda Hingga Modernisme Amerika*. Depok: Penerbit Buku Kepik Ungu.
- Sato, K. T. dan Tennien, P. M. 1976. *Aku Terkenang Flores (I Remember Flores)*. Ende: Nusa Indah.
- Satu, A. 2012. "Karya Pastoral SVD di Manggarai: 1914-Sekarang dan Masa Mendatang." Hlm. 38-52 dalam *Budaya & Pergumulan sosial: Refleksi Yubeleum 100 Tahun Gereja Katolik Manggarai*.

- Disunting oleh Martin Chen dan Charles Suwendi. Jakarta: Penerbit Obor.
- Scott, James C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Heaven & London: Yale University Press.
- Siahaan, N. H. T. 2007. *Hutan, Lingkungan, dan Paradigma Pembangunan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Therborn, Goran. 2008. *From Marxism to Post-Marxism*. New York and London: Verso.
- Timor Express. 2013. "TKI Ilegal Terbanyak dari Flores Timur." Diakses 10 September 2013 (<http://www.tifafoundation.org/tki-illegal-terbanyak-dari-flores-timur-2/>).
- Tolo, Emilianus Y. S. 2012. "Flores Kaya, Tapi Miskin." *Flores Pos*, 28 April.
- , 2013a. "Public Participation in the Implementation of Forestry Decentralization in Indonesia." *Bisnis & Birokrasi* 20(2):113-120.
- , 2013b. "Tradisi, Hak atas Tanah, dan Penciptaan Kesejahteraan Masyarakat Lokal". Laporan Penelitian Lapangan (8-23 Oktober 2013) di Flores oleh Universitas Gadjah Mada dan University of Agder, Norwegia.
- , 2014. "Land Grabbing dan Reforma Agraria Indonesia." *Majalah Basis* 1-2, Tahun 63, Yogyakarta.
- , 2016. "Tour de Flores dan Reproduksi Kemiskinan." *Islam Bergerak*, Mei 21. Diakses 20 Agustus 2016 (<http://islambergerak.com/2016/05/1819/>)
- Tule, P. 2004. *Longing for the House of God, Dwelling in the House of Ancestors: Local Belief, Christianity, and Islam among the Keo of Central Flores*. Freiberg, Swis: Studia Instituti Anthropos 50. Academic Press.
- , 2006. "We are Children of the Land: A Keo Perspective, dalam Reuter", Hlm. 211-236 dalam *Sharing the Earth, Dividing the Land: Land and Territory in the Austronesian World*. disunting oleh Thomas Reuter. Australia: Australian National University Press.
- , 2013. "Comunal Land Tenure in Flores." makalah dipresentasikan kepada mahasiswa University of Agder Norwegia di Maumere, Ledalero, Januari 2013.
- Webb, R. A. F. P. 1986. "Adat and Christianity in Nusa Tenggara Timur: Reaction and Counteraction." *Philippine Quarterly of Culture and Society* 14:339-365.

Wuryandari, G., ed. 2014. *Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Perspektif Sosial: Permasalahan dan Kebijakan*. Jakarta: LIPI Press.

Zaenudin, Dundin. 2014. "Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur: Catatan Penutup." Hlm. 367-366 dalam *Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Perspektif Sosial: Permasalahan dan Kebijakan*. Disunting oleh Wuryandari, G. Jakarta: LIPI Press.